

BAB 4

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sudah menjalankan manajemen penanganan sampah menurut teori George R Terry namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Meskipun demikian, pada planning dan actuating DLH sudah menjalankan yaitu: 1) Planning Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sudah memiliki program seperti bank sampah Bank Sampah Unit (BSU) dan TPS 3R bertujuan mengurangi volume sampah dan mendorong partisipasi masyarakat, sementara untuk pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu berencana membangun fasilitas PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan RDF (Rufuse Drive Fuel) di TPA Sumur Batu yang diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah serta akan dibangunnya depo limbah B3 rumah tangga yang bertujuan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum limbah B3 diproses atau dimusnahkan sesuai dengan regulasi lingkungan. 2) Organizing di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menunjukkan pengaturan tugas yang lebih jelas untuk menangani permasalahan sampah yang ditangani oleh Bidang Pengurangan Sampah dan Limbah B3 serta Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan. Namun, pada 3) Actuating di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti: kendala proses lelang yang menghambat modernisasi pembangunan PLTSa yang menyebabkan pembatalan proyek, sehingga pengelolaan di TPA Sumur Batu masih menggunakan *open dumping*, partisipasi

masyarakat belum optimal meskipun sosialisasi sudah dilakukan dan pemberian peralatan di TPS 3R tidak sesuai kebutuhan di lapangan, serta pelatihan dan bimbingan yang diberikan juga belum merata. Selain itu, Pada 4) Controlling masih belum optimal sebab monitoring dan evaluasi rutin terhadap program pengelolaan sampah masih kurang, sehingga berbagai masalah, terdapat bank sampah yang vakum dan termasuk ketidaksesuaian kapasitas peralatan. Pengawasan terhadap pengangkutan sampah sudah terdapat namun masih ditemukan kendaraan yang tidak layak beroperasi sehingga pengawasan yang dilakukan belum optimal, evaluasi terhadap kerusakan kendaraan dan tindak lanjut perbaikan juga belum dilakukan dengan maksimal.

Adapun hambatan dalam penerapan SNI 3242:2008 dalam penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yaitu: 1) Persyaratan Hukum, dalam penanganan sampah Kota Bekasi memiliki dasar hukum dan peraturan yang mendukung dalam penanganan sampah di Kota Bekasi sesuai dengan SNI 3242:2008, Hambatan tersebut terletak pada efektivitas penegakan hukum yang masih kurang. 2) Teknik operasional pada penanganan sampah belum dilakukan optimal karena sebagian besar masyarakat masih mencampur sampah tanpa pemisahan, pengolahan residu masih dibuang ke TPA serta komposting dan daur ulang belum diterapkan secara luas meskipun sudah mulai terdapat pengelolaan sampah namun yang melaksanakan baru di bank sampah dan TPS 3R. 3) Pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Bekasi masih bergantung pada APBD, dukungan Jakarta, dan retribusi sampah. Namun, terdapat hambatan dalam memastikan keberlanjutan pendanaan, terutama karena rendahnya komitmen

perusahaan dalam program CSR. 4) Peran serta masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Bekasi masih menghadapi hambatan, terutama rendahnya kesadaran akan dampak sampah dan minimnya keterlibatan dalam program seperti bank sampah. Volume sampah di TPA tetap tinggi, sementara daerah tanpa fasilitas TPS3R atau bank sampah berkontribusi sangat sedikit.

3.2 Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mempercepat pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan menyelesaikan kendala pada tahapan lelang dan mempercepat prosedur. Tingkatkan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kota Bekasi, dan pihak swasta untuk kelancaran proyek. Selain PLTSa, mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah lainnya.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan operasional, pendampingan teknis dalam pengelolaan sampah, ataupun pemberian pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melakukan pelatihan pengelolaan sampah melalui seminar atau lokakarya tatap muka di kantor kecamatan atau kelurahan. Kegiatan ini akan mengundang pengelola bank sampah dan pengelola TPS 3R di sekitar kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Materi

yang ditampilkan antara lain memilah sampah, membuat kompos, membuat kerajinan dari sampah, dan memasarkan produk daur ulang.

4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat mengoptimalkan pengelolaan Bank Sampah Unit dan TPS 3R dengan menggunakan Linktree sebagai platform pemantauan dan pengendalian kegiatan. Linktree menyediakan data real-time mengenai volume sampah yang dikelola di Kota Bekasi, laporan kegiatan pelaksanaan BSU dan pelaksana TPS 3R terkait sampah yang dikelola, dan fasilitas pelaporan keluhan atau permasalahan. Sistem ini mendukung pengendalian dengan menjadwalkan pemeriksaan rutin oleh DLH Kota Bekasi untuk menjamin kelancaran operasional dan tindak lanjut jika diperlukan.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus melakukan inspeksi berkala dengan standar kelayakan operasional untuk kendaraan pengangkut sampah dan melakukan evaluasi dan perbaikan bagi kendaraan yang tidak layak beroperasi agar pengangkutan sampah dapat berjalan maksimal dan tidak membahayakan bagi pekerja maupun masyarakat.
6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi membentuk kelompok kerja di tingkat RT/RW untuk mengedukasi terkait pentingnya pemilahan sampah kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Kelompok kerja ini bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan relawan untuk melakukan pendekatan langsung kepada warga melalui kegiatan sosial, seperti arisan, paguyuban dan lain-lain, yang mengangkat topik terkait sampah. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih termotivasi menjaga kebersihan dan terlibat dalam pengelolaan sampah